

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, T. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD, Umur Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R. dan Tahar, A. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 22 No. 1, hal 25-33.
- Heriningsih, S. dan Ruserlistyani. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 13 No. 02, hal 11-19.
- Hilmi, A.Z. dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Idris, A.L.M., Surasni, N.I. dan Irwan, M. 2018. The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. *Ijer*. Vol. 9 No. 1, hal 62-74.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Khasanah, N.L. dan Rahardjo, S.N. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3 No. 3, hal 1-11.
- Mandasari, P. 2009. Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government. *Tesis Master*. Universitas Sebelas Maret.
- Martani, D. dan Liestiani, A. 2010. Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia. *The 22th Asian – Pacific Conference on International Accounting Issues, Gold Coast Australia*. School of Business, Bond University, Australia. 7 – 10 November 2010.

- Maulana, C. 2015. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Pandansari, T. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XIX No. 3, hal 463-484.
- Patrick, P.A. 2007. *The Determinants of Organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permadi, R. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Priharjanto, A. dan Wardani, Y. Y. 2017. Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Info Artha*. Vol. 1 No. 1, hal 97-110.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*. Vol 2 No 1, hal 37-46.
- Ratnasari. A.D. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Robbins, W.A. dan Austin, K.R. 1986. Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. *Journal of Accounting Research*. Vol. 24 No 2, hal 412-421.

- Sari, A. P. Martani, D. dan Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan.
- Sari, D. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang Baik. *Indonesian Journal of Economic and Business*. Hal 116-124.
- Sarwono, J. 2017. *Mengenal Prosedur-Prosedur Populer dalam SPSS 23*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U. 2003. *Research Method for Business (4th ed.)*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Setyaningrum, D. dan Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 9 No. 2, hal 154-170.
- Silfia, R., Meihendri dan Yunilma. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Barat periode 2010-2013).
- Simbolon, H.A.U. dan Kurniawan, C.H. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*. Vol. 30 No. 1, hal 54-70.
- Sinaga, Y.F. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siregar, B. dan Pratiwi, N. 2017. The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence On Economic Growth and Human Development Index In Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol. 19 No. 2, hal 65-71.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., Brown, A. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. Penelitian Hibah Publikasi Internasional*. LP2M UNS.

Suhardjanto D. dan Yulianingtyas, R.R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing. Vol. 8 No. 1, hal 30-42.*

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Website Resmi BPK RI, 2018. www.bpk.go.id

Website Resmi BPK Semarang, 2018. www.semarang.bpk.go.id

Website Resmi Provinsi Jateng, 2018. <https://jatengprov.go.id/publik/2017-pendapatan-pemprov-jateng-naik-rp-4-t/> diakses pada tanggal 22 Oktober pukul 20.57 WIB.